



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2002, 2015

KEMENHUB. Angkutan Udara. Perintis. Tahun
2016. Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 194 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat, perlu meninjau kembali tarif angkutan udara perintis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU) dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).
- (3) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis pada rute-rute yang dilayani berdasarkan biaya pokok operasi pesawat udara, daya beli masyarakat dan realisasi penerbangan.
- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU) dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Harga jual tiket untuk bayi (infant) sebesar 10%;
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan udara perintis yang belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tahun anggaran berjalan, berpedoman pada tarif yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (2) Apabila terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberlakukan tarif sementara yang jangka waktunya berakhir sampai ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pemutusan kontrak keseluruhan rute;
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila setelah satu bulan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ditindaklanjuti, dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak keseluruhan rute.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2015 tentang Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan Kurs Dollar Amerika Serikat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PM 194 TAHUN 2015
TENTANG TARIF ANGKUTAN PERINTIS TAHUN 2016

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2016

NO.	RUTE		TARIF PENUMPANG (Rp)	TARIF BARANG (kg)	
1	ABMISIBIL	-	OKSIBIL	166,000	1,500
2	ABOGE	-	KEPI	201,000	1,800
3	AEK GODANG	-	SILANGIT	202,000	1,800
4	AGIMUGA	-	TIMIKA	301,000	2,700
5	ALAMA	-	TIMIKA	306,000	2,800
6	ALOR	-	ATAMBUA	242,000	2,200
7	AMBON	-	BANDA	269,000	2,400
8	AMBON	-	KISAR	323,000	2,900
9	AMBON	-	KUFAR	281,000	2,500
10	AMBON	-	WAHAI	292,000	2,600
11	AMBON	-	NAMLEA	202,000	1,800
12	AMPANA	-	GORONTALO	281,000	2,500
13	AMPANA	-	LUWUK	195,000	1,800
14	AMPANA	-	PALU	246,000	2,200
15	ANGGI	-	MANOKWARI	237,000	2,100
16	ANGGRUK	-	DEKAI	209,000	1,900
17	AYAWASI	-	SORONG	269,000	2,400
18	BABO	-	MANOKWARI	269,000	2,400
19	BADE	-	KEPI	238,000	2,100
20	BAJAWA	-	WAINGAPU	206,000	1,900
21	BALIKPAPAN	-	SANGATA	301,000	2,700
22	BANDA ACEH	-	BLANGPIDIE	237,000	2,100
23	BANDA ACEH	-	GAYO LUWES	323,000	2,900
24	BANDA ACEH	-	KUTACANE	359,000	3,200
25	BANDA ACEH	-	NAGAN RAYA	314,000	2,800
26	BANDAR LAMPUNG	-	KRUI	251,000	2,300
27	BANJARMASIN	-	KUALA PEMBUANG	350,000	3,200
28	BATAM	-	DABO SINGKEP	215,000	1,900
29	BATAM	-	PASIR PANGARAIAN	217,000	2,000
30	BATOM	-	JAYAPURA	314,000	2,800
31	BATOM	-	OKSIBIL	196,000	1,800
32	BAU-BAU	-	KENDARI	211,000	1,900
33	BAU-BAU	-	WAKATOBI	295,000	2,700
34	BAWEAN	-	SURABAYA	202,000	1,800
35	BENGKULU	-	ENGGANO	202,000	1,800
36	BENGKULU	-	MUKOMUKO	224,000	2,000
37	BENGKULU	-	PAGAR ALAM	220,000	2,000

38	BEOGA	-	TIMIKA	306,000	2,800
39	BIAK	-	NUMFOR	269,000	2,400
40	BILOGAI	-	TIMIKA	275,000	2,500
41	BIMA	-	LABUAN BAJO	206,000	1,900
42	BINTUNI	-	MERDEY	224,000	2,000
43	BINUANG	-	LONGLAYU	144,000	1,300
44	BINUANG	-	MALINAU	180,000	1,600
45	BLANGPIDIE	-	MEDAN	269,000	2,400
46	BLANGPIDIE	-	SINABANG	224,000	2,000
47	BOMAKIA	-	MERAUKE	334,000	3,000
48	BOMAKIA	-	TANAH MERAH	220,000	2,000
49	BONE	-	KOLAKA	235,000	2,100
50	BONE	-	MAKASSAR	235,000	2,100
51	BONE	-	MAMUJU	281,000	2,500
52	BONE	-	SELAYAR	246,000	2,200
53	BOROME	-	JAYAPURA	305,000	2,700
54	BOROME	-	OKSIBIL	229,000	2,100
55	BOTAWA	-	NABIRE	251,000	2,300
56	BUA	-	KENDARI	391,000	3,500
57	BUA	-	KOLAKA	242,000	2,200
58	BUA	-	MAKASSAR	235,000	2,100
59	BUOL	-	GORONTALO	195,000	1,800
60	BUOL	-	PALU	313,000	2,800
61	BUOL	-	TOLITOLI	164,000	1,500
62	DABO SINGKEP	-	JAMBI	215,000	1,900
63	DABO SINGKEP	-	PANGKAL PINANG	289,000	2,600
64	DABO SINGKEP	-	PEKANBARU	287,000	2,600
65	DABO SINGKEP	-	TANJUNG PINANG	242,000	2,200
66	DABRA	-	JAYAPURA	314,000	2,800
67	DATAH DAWAI	-	MELAK	281,000	2,500
68	DATAH DAWAI	-	SAMARINDA	352,000	3,200
69	DEKAI	-	HOLUWUN	229,000	2,100
70	DEKAI	-	KENYAM	169,000	1,500
71	DEKAI	-	NINIA	229,000	2,100
72	DEKAI	-	PASEMA	229,000	2,100
73	DEKAI	-	SILIMO	229,000	2,100
74	DEKAI	-	SOBAHAM	209,000	1,900
75	DEKAI	-	SURU-SURU	196,000	1,800
76	DEKAI	-	TANAH MERAH	212,000	1,900
77	DEKAI	-	TIMIKA	275,000	2,500
78	DUMA	-	TIMIKA	266,000	2,400
79	ELELIM	-	WAMENA	215,000	1,900
80	ENDE	-	SABU	232,000	2,100
81	EWER	-	MERAUKE	248,000	2,200
82	EWER	-	TIMIKA	261,000	2,300
83	FAWI	-	NABIRE	264,000	2,400
84	GAYO LUWES	-	MEDAN	292,000	2,600
85	GEBE	-	TERNATE	314,000	2,800

86	GORONTALO	-	POSO	324,000	2,900
87	GUNUNG SITOLI	-	PULAU-PULAU BATU	202,000	1,800
88	GUNUNG SITOLI	-	SIBOLGA	242,000	2,200
89	GUNUNG SITOLI	-	SILANGIT	215,000	1,900
90	ILAGA	-	NABIRE	251,000	2,300
91	ILAGA	-	TIMIKA	258,000	2,300
92	ILLU	-	JAYAPURA	255,000	2,300
93	ILLU	-	NABIRE	229,000	2,100
94	INANWATAN	-	SORONG	296,000	2,700
95	IWUR	-	OKSIBIL	179,000	1,600
96	JAMBI	-	KERINCI	323,000	2,900
97	JAMBI	-	MUARABUNGO	215,000	1,900
98	JAYAPURA	-	KARUBAGA	253,000	2,300
99	JAYAPURA	-	LUBAN	220,000	2,000
100	JAYAPURA	-	TANAH MERAH	301,000	2,700
101	JILA	-	TIMIKA	313,000	2,800
102	JITA	-	TIMIKA	313,000	2,800
103	KABARE	-	WASAI	202,000	1,800
104	KAIMANA	-	POTOWAI	313,000	2,800
105	KAMBUAYA	-	MANOKWARI	242,000	2,200
106	KAMBUAYA	-	SORONG	242,000	2,200
107	KAPIRAYA	-	TIMIKA	229,000	2,100
108	KARIMUN JAWA	-	SEMARANG	222,000	2,000
109	KARIMUN JAWA	-	SURABAYA	247,000	2,200
110	KARUBAGA	-	WAMENA	189,000	1,700
111	KEBAR	-	MANOKWARI	168,000	1,500
112	KENDARI	-	SELAYAR	305,000	2,700
113	KENYAM	-	TIMIKA	257,000	2,300
114	KENYAM	-	WAMENA	196,000	1,800
115	KEPI	-	MERAUKE	225,000	2,000
116	KEPI	-	SENGGO	242,000	2,200
117	KEPI	-	TIMIKA	310,000	2,800
118	KETAPANG	-	MANIS MATA	225,000	2,000
119	KETAPANG	-	NANGA PINOH	267,000	2,400
120	KETAPANG	-	SINTANG	281,000	2,500
121	KILMIT	-	TIMIKA	319,000	2,900
122	KIMAM	-	MERAUKE	353,000	3,200
123	KISAR	-	KUPANG	296,000	2,700
124	KISAR	-	MOA	211,000	1,900
125	KISAR	-	SAUMLAKI	323,000	2,900
126	KIWIROK	-	OKSIBIL	144,000	1,300
127	KOBAGMA	-	WAMENA	169,000	1,500
128	KOKONAO	-	TIMIKA	301,000	2,700
129	KOLAKA	-	TANA TORAJA	254,000	2,300
130	KRUI	-	PALEMBANG	237,000	2,100
131	KUALA PEMBUANG	-	PALANGKARAYA	323,000	2,900
132	KUTACANE	-	MEDAN	228,000	2,100
133	LABUAN BAJO	-	SELAYAR	281,000	2,500

134	LABUAN BAJO	-	WAINGAPU	235,000	2,100
135	LANGGUR	-	LARAT	224,000	2,000
136	LARAT	-	SAUMLAKI	215,000	1,900
137	LETUNG	-	TANJUNG PINANG	251,000	2,300
138	LONG APUNG	-	MALINAU	314,000	2,800
139	LONG APUNG	-	SAMARINDA	375,000	3,400
140	LONG APUNG	-	TANJUNG SELOR	314,000	2,800
141	LONG BAWAN	-	NUNUKAN	350,000	3,200
142	LONG BAWAN	-	TARAKAN	323,000	2,900
143	LONGBAWAN	-	MALINAU	283,000	2,500
144	LONGBAWAN	-	TANJUNG SELOR	350,000	3,200
145	LUBAN	-	OKSIBIL	196,000	1,800
146	MAKASSAR	-	MAMASA	274,000	2,500
147	MAKASSAR	-	MASAMBA	281,000	2,500
148	MAKASSAR	-	TANA TORAJA	313,000	2,800
149	MAMASA	-	MAMUJU	235,000	2,100
150	MAMIT	-	WAMENA	242,000	2,200
151	MAMUJU	-	TANA TORAJA	235,000	2,100
152	MANGGELUM	-	TANAH MERAH	290,000	2,600
153	MANGOLE	-	TERNATE	283,000	2,500
154	MANOKWARI	-	MERDEY	235,000	2,100
155	MANOKWARI	-	NUMFOR	247,000	2,200
156	MAPENDUMA	-	TIMIKA	209,000	1,900
157	MAPENDUMA	-	WAMENA	196,000	1,800
158	MASAMBA	-	RAMPI	235,000	2,100
159	MASAMBA	-	SEKO	235,000	2,100
160	MAUMERE	-	WAINGAPU	251,000	2,300
161	MEDAN	-	SINGKIL	269,000	2,400
162	MEDAN	-	TAKENGON	359,000	3,200
163	MEDAN	-	TAPAK TUAN	247,000	2,200
164	MERAUKE	-	MINDIPTANA	351,000	3,200
165	MERAUKE	-	OKABA	259,000	2,300
166	MERAUKE	-	SENGGO	361,000	3,200
167	MERAUKE	-	WANAM	303,000	2,700
168	MERAUKE	-	TANAH MERAH	329,000	3,000
169	MOROTAI	-	TERNATE	292,000	2,600
170	MUARA TEWEH	-	PALANGKARAYA	363,000	3,300
171	MUARA WAHAU	-	SAMARINDA	301,000	2,700
172	MUARABUNGO	-	MUKOMUKO	251,000	2,300
173	MUGI	-	WAMENA	196,000	1,800
174	MULIA	-	NABIRE	336,000	3,000
175	NABIRE	-	SINAK	287,000	2,600
176	NABIRE	-	SUGAPA	245,000	2,200
177	NABIRE	-	WAGHETE	220,000	2,000
178	NAGAN RAYA	-	SINABANG	292,000	2,600
179	NANGAPINOH	-	PONTIANAK	281,000	2,500
180	OKBAB	-	OKSIBIL	179,000	1,600
181	OKSIBIL	-	TANAH MERAH	293,000	2,600

182	PADANG	-	PASAMAN BARAT	251,000	2,300
183	PADANG	-	PULAU-PULAU BATU	269,000	2,400
184	PADANG	-	ROKOT	285,000	2,600
185	PAGAR ALAM	-	PALEMBANG	215,000	1,900
186	PALANGKARAYA	-	PANGKALAN BUN	363,000	3,300
187	PALANGKARAYA	-	PURUKCAHU	296,000	2,700
188	PALANGKARAYA	-	SAMPIT	215,000	1,900
189	PALU	-	RAMPI	247,000	2,200
190	PALU	-	SEKO	247,000	2,200
191	PARO	-	TIMIKA	247,000	2,200
192	PASAMAN BARAT	-	PEKAN BARU	215,000	1,900
193	PEKAN BARU	-	TB. KARIMUN	220,000	2,000
194	PEKANBARU	-	TEMBILAHAN	242,000	2,200
195	POTOWAI	-	TIMIKA	345,000	3,100
196	PULAU-PULAU BATU	-	SIBOLGA	202,000	1,800
197	RUTENG	-	SELAYAR	254,000	2,300
198	RUTENG	-	WAINGAPU	203,000	1,800
199	SABU	-	WAINGAPU	242,000	2,200
200	SANANA	-	TERNATE	283,000	2,500
201	SINAK	-	TIMIKA	261,000	2,300
202	SORONG	-	TEMINABUAN	215,000	1,900
203	SORONG	-	WASAI	242,000	2,200
204	SUMENEP	-	SURABAYA	207,000	1,900
205	TANAH MERAH	-	WANGGEMALO	357,000	3,200
206	TANAH MERAH	-	YANIRUMA	290,000	2,600
207	TIMIKA	-	TSINGA	256,000	2,300
208	TIMIKA	-	WANGBE	220,000	2,000
209	TIOM	-	WAMENA	215,000	1,900

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN